

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir empat dasawarsa silam, lahir sebuah negara baru di kawasan Asia Tenggara ini. Wilayah bekas jajahan kolonial Inggris itu dimerdekakan 39 tahun yang silam (31 Agustus 1957). Pada mulanya diberi nama Negara Persemakmuran Tanah Melayu yang berbatasan sebelah Barat dengan Thailand dan sebelah Timur dan Tenggara dengan Kalimantan dan Sumatera (Indonesia) (Heri, 1996).

Pada mulanya negara Persekutuan Tanah Melayu memang dipersiapkan lebih dulu secara matang. Tahun 1946, lahir sebuah organisasi politik yang diberi nama UMNO (*United Malays National Organization*) yang menjadi partai terkuat dalam Barisan Nasional (BN), versus dari *Malayan Union Plan* bentukan Inggris. Dialah organisasi politik pertama yang didirikan oleh pribumi, yang tanpa henti memperjuangkan kemerdekaan Persatuan Tanah Melayu (sekarang Malaysia) (Adenansi 1991; Heri, 1996).

Jumlah penduduk Malaysia (1998) sebesar 22 juta jiwa. Terdiri dari etnik Melayu 62 persen, etnik Cina 30 persen, sedangkan etnik India dan keturunan asing lainnya 8 persen (Republika, 20/11/1995). Tokoh-tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussien Oon dan Mahathir Mohammad adalah pendiri-pendiri UMNO tahun 1946. Dan berturut-turut mereka terpilih sebagai Perdana Menteri pertama, menyusul Tun

Abdul Razak sebagai Perdana Menteri kedua, kemudian Tun Hussien Oon yang ketiga, dan sekarang Mahathir Mohammad (Adenansi, 1991).

Sejarah awal kebijakan politik luar negeri Malaysia setelah merdeka memang menetapkan sikap pro Barat dan anti komunis sebagai prinsip politik luar negerinya. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kondisi ekonomi politik dalam negeri Malaysia. Salah satu ancaman yang cukup serius pada masa itu adalah kekuasaan Partai Komunis Malaya (PKM) yang berorientasi ke Republik Rakyat Cina (RRC). Sikap ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Barat dan perlunya mencari dukungan internasional, sangat melatarbelakangi kebijakan politik luar negeri Semenanjung Malaysia pada masa itu (Salamm, 1992:82).

Sejak pemerintahan Mahathir (1981-sekarang), kebijakan politik luar negeri Semenanjung Malaysia memiliki perubahan besar jika dibandingkan pada masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, maupun Tun Hussien Oon (Salamm, *ibid*). Perubahan tersebut bisa dilihat dengan kebijakan yang semula ke Barat (Inggris) sekarang ke Timur (Jepang).

Kebijakan politik luar negeri Malaysia dengan bergeser ke Timur tentunya sangat berlawanan arah dengan gaya kepemimpinan para Perdana Menteri sebelumnya yang dikenal pro Barat. Kebijakan yang bernuansa anti Inggris ini didasari oleh keyakinan Mahathir bahwa Inggris tidak cocok lagi untuk dijadikan contoh (panutan) bagi pembangunan ekonomi dan politik Malaysia. Munculnya *Look East Policy* (Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapore) yang lebih dikenal dengan sebutan NICs

Asia merupakan jawaban yang tepat dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan politik Malaysia memasuki abad ke-21 (Kay Kim, 1991).

Beralihnya perhatian kebijakan politik luar negeri Semenanjung Malaysia semasa Mahathir yang dikenal dengan Kebijakan Memandang ke Timur (*Look East Policy*) sebenarnya secara ekonomi lebih diilhami oleh disiplin atau etika kerja orang Jepang, yang menekankan pada masalah etos kerja, kerajinan, disiplin kerja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan, mementingkan produktivitas, kualitas dan memperkecil jurang pemisah antara majikan dengan pekerja.

Sedangkan secara politik lebih didorong oleh keinginan Mahathir untuk menjadikan negara Semenanjung Malaysia menjadi negara yang disegani dan berpengaruh di kawasan Asia dan dunia internasional.

Look East Policy sudah barang tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan perhatian Jepang dan Korea Selatan pada Malaysia, dan membawa Malaysia ke arah pada suatu sikap yang lebih seimbang, mandiri dengan melepaskan diri dari keterbukaan yang hampir seluruhnya pada Barat di masa lalu. “Barat” menurut Mahathir, “tidak maju, dan kelihatannya telah mengalami kemunduran. Jadi, agar supaya Malaysia menjadi maju, sebaiknya kita mencontoh Jepang” (Scalapino, 1990 :176).

Ada beberapa tujuan penting mengapa Kebijakan Memandang ke Timur memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi politik di Semenanjung Malaysia *pertama*, menjadikan Semenanjung menjadi salah satu bangsa yang terdiri atas para

wirausahawan yang inovatif, tenaga kerja yang terampil dan disiplin dalam membantu mengatasi dilemma Melayu. *Kedua*, menciptakan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta yang hebat, kuat dan canggih dalam mengurangi ketergantungannya terhadap dukungan pemerintah (*Ibid*:179).

Mahathir memang dikenal sebagai negarawan yang vokal tegas dan memiliki komitmen nasionalisme yang tinggi. Hal itu terbukti dengan besarnya dukungan politik dari tokoh-tokoh politik muda yang terhimpun dalam kabinet seperti Datuk Najib Tun Razak (Menhankam), Datuk Sri Rafidah Azis (Menteri Perdagangan dan Perindustrian), Datuk Megat Juned Ayub (Wakil Mendagri). Termasuk dalam kelompok ini adalah Datuk Anwar Ibrahim, seorang politisi muda yang memiliki pikiran cerdas, brilian, sederhana dan memiliki latarbelakang keislaman yang kuat, sekaligus sebagai tokoh kepercayaan Mahathir dalam suksesi kepemimpinan UMNO lima tahun yang lalu. Saat itu “kubu” Anwar Ibrahim mengukir kemenangan dan mampu mengeser “kubu” Abdul Ghafar Baba dan pengikutnya.

Reformasi kebijakan ekonomi politik yang dilakukan Mahathir, sebenarnya tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh senior. Mereka adalah Datuk Sri Sanusi Juned (Menteri Pertanian) dan Abdul Ghafar Baba yang saat itu masih menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia (*Ibid*)

Dengan melihat terjadinya pergeseran kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir, akhirnya memotivasi kami melakukan penelitian ini. Dengan maksud

ingin menungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir yang semula ke Barat sekarang ke Timur.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat pokok permasalahan sebagai berikut : faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir yang semula ke Barat sekarang ke Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: berusaha menjelaskan secara obyektif mengenai perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir.

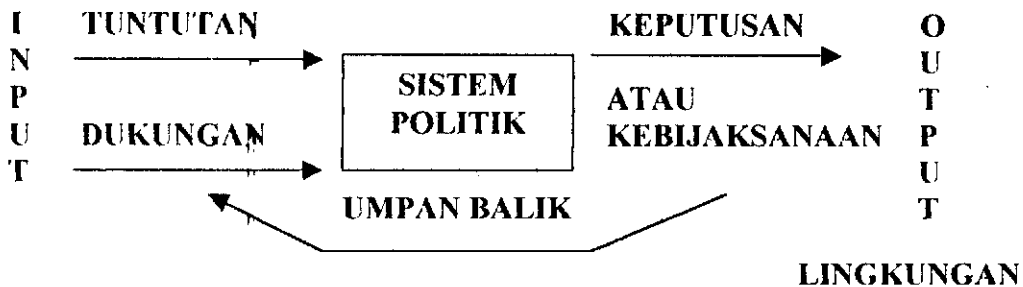
D. Tinjauan Pustaka

Teori sangatlah penting untuk membantu kami dalam menentukan tujuan. Di samping untuk memilih konsep yang tepat guna memberikan petunjuk diambilnya hipotesa, maka teori-teori yang akan digunakan penulis adalah Teori Pembuatan Keputusan (*decision making theory*) dari William D. Coplin yang dilengkapi dengan penjelasan dari David Easton dan Richard C. Snyder serta diperkuat oleh konsep Kepentingan Nasional menurut Hans J. Morgenthau. Teori di atas dipandang relevan karena untuk melaksanakan sebuah kebijakan (*foreign policy action*) selalu akan didasarkan pada pembuatan keputusan (*decision making*) terlebih dahulu.

Teori pembuatan keputusan merupakan sebuah model untuk membantu menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi. Teori ini berasumsi bahwa politik (kebijakan) itu dibuat oleh manusia. Keputusan itu sendiri merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah proses politik yang dalam batasan David Easton disebut output dari sebuah sistem politik.

David Easton menjelaskan cara kerja sebuah sistem politik sebagai berikut:

LINGKUNGAN



Dalam proses konversi itulah terjadi proses pembuatan keputusan yang bisa didefinisikan sebagai tindakan memilih berbagai alternatif yang ada, yang diliputi dengan berbagai ketidakpastian (Mas'ood, 1990:3-7).

Snyder (1958) mendefinisikan pembuatan keputusan berikut ini :

Decision-making diperoleh dari alternatif urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, dari satu prospek untuk melahirkan keadaan peristiwa yang khusus pada masa mendatang oleh para pembuat keputusan.

Morganthau (1978) memberikan definisi tentang kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan

mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan-hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.

Definisi yang dikemukakan di atas, diharapkan akan mempermudah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir. Dalam artian, menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.

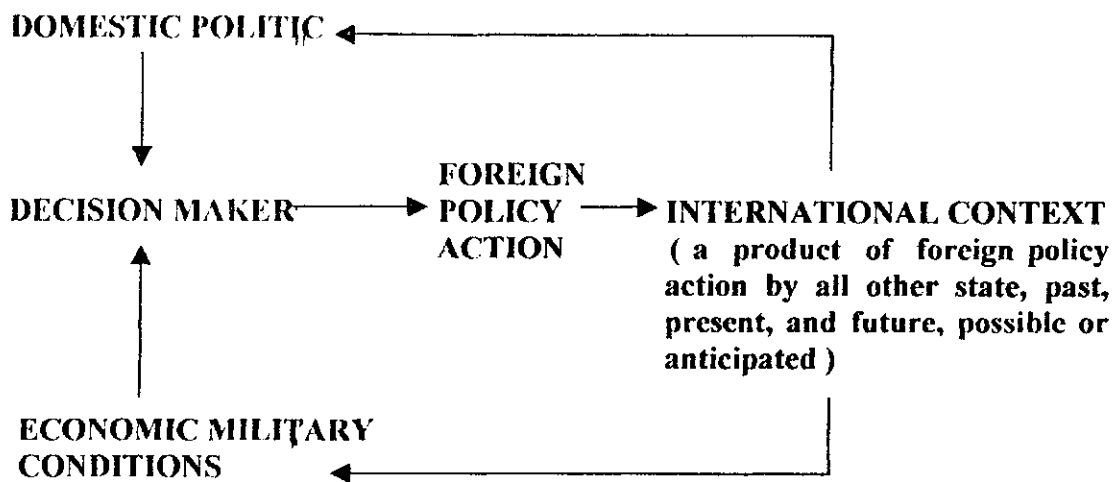
Dari sini membuktikan bahwa kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir tidak lepas dari upaya peningkatan perekonomian etnik Melayu sekaligus ambisi Malaysia menjadi sebuah negara industri baru yang memiliki kemandirian, berwibawa, dan disegani di kawasan Asia Pasifik.

Dengan demikian, pembuatan keputusan merupakan upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia serta mengakomodasi berbagai tujuan dan aspirasi yang berbeda satu dengan yang lain.

Pembuatan keputusan yang menyangkut kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dipengaruhi berbagai faktor, seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin (1971):

To be interested in why states be have as they do in internasional arena, we have to be interested in why their leaders make. However, it would be mistake to think that foreigh policy decision makers act in a vacum. On the countrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of there broad cate gories of considerations affecting the foreign policy decision maker. The first is domestic politics within thq foreign policy decisions-makers state. The second is the economic and military capability of his state. The third is the international context

the particular position in which his state finds it self specifically in relation to the other state in the system.



Ilustrasi gambar di atas ini menjelaskan tentang interaksi ketiga faktor yang menghasilkan tindakan kebijakan politik luar negeri. Dari diagram di atas tampak bahwa dalam membuat keputusan, para pembuat keputusan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yakni :

Pertama, kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negerinya. Statemen yang dilontarkan Mahathir selalu memberikan keuntungan bagi politik perkauman di Malaysia, terutama etnik Melayu. Etnik Melayu di Semenanjung Malaysia sangat identik dengan Islam. Duet Mahathir-Anwar Ibrahim menggunakan tema : "*Berjuang untuk Islam dan kebangkitan kaum Melayu*", merupakan monuver politik mereka dalam setiap tindakan. Reformasi ekonomi politik yang dilakukan Mahathir merupakan strategi baru untuk mendapatkan dukungan dari komunalnya. Sikap oposan dan kritis Mahathir terhadap Barat, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kesadaran politik etnik Melayu. Menguatnya

kepemimpinan Mahathir dalam Barisan Nasional telah terbukti melahirkan dukungan politik yang cukup besar dan mengakar atas kebijakannya.

Sejauh ini, kebijakan Mahathir melalui *New Economic Policy* (NEP) telah memberikan peluang sekaligus kemajuan bagi Semenanjung Malaysia untuk lebih maju dan mandiri secara ekonomi. Perbaikan dan peningkatan perekonomian etnik Melayu menjadi sasaran utamanya yang disebabkan oleh masalah kesenjangan sosial dan distribusi ekonomi yang tidak adil dan merata antar etnik (Melayu-Cina). Maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada etnik Melayu. Kelompok etnik Melayu yang hanya dikenal sebagai petani, pemotong karet, status ekonomi miskin dan pegawai rendahan serta pendapatannya rendah atau lebih dikenal dengan sebutan mitos Melayu tak cakap berniaga (Republika, 1-3/4/1996; Keadilan, 22/4/1996), kini mulai bangkit seperti cendawan di pagi hari. Munculnya Kelas Menengah Melayu yang bergerak sebagai pengusaha, bankir, birokrat, militer, politisi, pengacara, manajer, dan administrator, adalah momentum yang telah lama dirindukan.

Terjadinya diversifikasi kekuatan ekonomi politik internasional, yang semula hegemonik telah mulai bergeser ke arah yang lebih majemuk, secara dominan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Semenanjung Malaysia. Kemunculan Jepang sebagai kekuatan raksasa ekonomi dunia dan tampilnya Korea Selatan, Singapore, Taiwan, dan Hongkong yang disebut dengan Empat Naga Asia telah menjadi perhatian serius Mahathir untuk melakukan perubahan orientasi kebijakan politik luar negerinya. Mengingat secara regional kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan segala prestasinya. Maka kebijakan Mahathir Memandang ke Timur lebih

memprioritaskan pada peningkatan kepentingan ekonomi dalam negerinya. Dengan “berguru” kepada Jepang, merupakan langkah yang sangat strategis dan lebih “menjanjikan” di masa depan, mengingat Jepang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan segala kemajuannya, sehingga menjadi kekuatan ekonomi global (dunia) dalam memasuki abad ke-21 (Ahmad, 1990).

Akhirnya dengan menggunakan teori pembuatan keputusan di atas, diharapkan membantu kami menuju kemudahan dalam pengambilan hipotesa.

E. Hipotesis

Jawaban sementara yang dapat diambil sesuai dengan pokok permasalahan dan dengan menggunakan teori yang dikemukakan di atas, kami mengajukan hipotesis yang dirumuskan bahwa perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir sangat dipengaruhi oleh dua faktor :

1. Keinginan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan perkonomian kaum Melayu, sehubungan dengan rentannya permasalahan etnik (konflik Melayu-Cina).
2. Kepentingan Malaysia untuk mendekati diri dengan negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapore dan Hongkong, dengan kemunculannya sebagai kekuatan ekonomi dunia.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : “Explanatory Research” yaitu kegiatan riset yang diarahkan pada usaha penyusunan proporsi-proporsi atau

generalisasi yang dapat memberikan penjelasan baik tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, makalah-makalah ilmiah dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Sedangkan teknik analisa data yang diperlukan adalah analisa kualitatif melalui langkah-langkah : pengumpulan data, tabulasi data, analisa data dan interpretasi data.

